"UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM(KPU) KOTA SOLOK MENJADIKAN RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK "

SKRIPSI

Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

MUTIA EKA MASPUTRI
NIM 14052047/2014

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2019

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul	:	Upaya KPU Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik
Nama	:	Mutia Eka Masputri
TM/ NIM	:	2014 / 14052047
Jurusan	:	Ilmu Sosial Politik
Program Studi	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas	:	Ilmu Sosial

Padang, 6 Februari 2019

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Al Rafni, M.Si	**Susi Fitria Dewi, S.Sos., M. Si., Ph.D**
NIP. 19680212 199303 2 001	**NIP. 19770916 200501 2 002**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis, Tanggal 31 Januari 2019 Pukul 10.30 s/d 12.30 WIB

Upaya KPU Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik

Nama	: Mutia Eka Masputri
TM / Nim	: 2014 / 14052047
Progam Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan	: Ilmu Sosial Politik
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, 6 Februari 2019

Tim Penguji:

Nama		Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Al Rafni, M. Si	
Sekretaris	: Susi Fitria Dewi S.Sos., M.Si., Ph.D	
Anggota	: Drs. Suryanef, M. Si	
Anggota	: Drs Nurman, M.Si	
Anggota	: Alia Azmi, S.IP,. M.Si	

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tugas akhir berupa skripsi dengan judul "Upaya Kpu Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Sebagai Sarana Pendidikan Politik" adalah asli karya saya sendiri;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yantg telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan menyebutkan pengarang dan dicantumkan pada kepustakaan;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat penyimpangan di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 11 Februari 2019
Saya yang menyatakan

Mutia Eka Masputri
NIM 14052047

ABSTRAK

Mutia Eka Masputri: NIM 14052047/2014. Upaya Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik

Penelitian ini di latarbelakangi bagaimana upaya KPU Kota Solok dalam memanfaatkan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mendeskripsikan upaya KPU dalam menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik, 2) menggabarkan kendala yang dihadapi KPU Kota Solok dalam menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder, di kumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi waktu ,teknik analisi data melalui reduksi data, penyajian data, interprestasi data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya KPU Kota Solok menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik adalah melakukan sosialisasi melalui web resmi KPU Kota Solok, melakukan kunjungan ke sekolah,melakukan kerjasama dengan fakultas hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok dan melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat.

Kata Kunci : ***Pendidikan Politik, Rumah Pintar Pemilu, KPU.***

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:"**Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik**". Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Ilmu Sosial Politik, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial , Universitas Negeri Padang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Al Rafni, M.Si sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, koreksi dan petunjuk yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Susi Fitria Dewi S.Sos., M.si., Ph.D sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, koreksi dan petunjuk yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Suryanef, M.Si, Bapak Drs Nurman S, M.Si dan Ibu Alia Azmi S.IP., M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan banyak masukan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku ketua jurusan ilmu sosial politik dan bapak Dr. Junaidi Indrawadi. M.Pd selaku sekretris jurusan ilmu sosial

politik, yang telah memberikn izin kepada penulis dalam menulis skripsi ini.

5. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd. yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
6. Bapak dan Ibu staf pengajar Pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Bapak ketua KPU Kota Solok, bapak kasubag SDM dan parmas, bapak kasubag teknis, bapak komisioner devisi SDM dan parmas, serta seluruh staf KPU Kota Solok yang telah memberikan data dan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa penulis ucapkan kepada orang tua dan adik tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa semangat dan dukungan moril dan materil kepada penulis.
9. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Negarawan Muda Indonesia angkatan 2014, mahasiswa prodi PPKn
10. Semua pihak yang telah ikut memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga bantuan bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari ALLAH Subhanahu wa ta'ala.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku. Semua itu murni dari peneliti

sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun/konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirulkalam, penulis ucapkan terima kasih.

Padang, februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR. iii

DAFTAR ISI. v

DAFTAR TABEL. vii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 10
C. Batasan Masalah 11
D. Rumusan Masalah 11
E. Tujuan Penelitian 11
F. Manfaat Penelitian 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori 13
   1. Konsep Rumah Pintar Pemilu (RPP) 13
      a. Pengertian Rumah Pintar Pemilu 13
      b. Tujuan dan Fungsi Rumah Pintar Pemilu 15
      c. Sasaran 16
      d. Lingkup materi 16
      e. Bentuk Pelayanan Rumah Pintar Pemilu 19
      f. Manajemen pengelolaan 19
      g. Anggaran 21
      h. Tata ruang 21
   2. konsep pendidikan politik 23
      a. pengertian pendidikan politik 23
      b. tujuan dan fungsi pendidikan politik 26
      c. sarana pendidikan politik 28
B. Kerangka Konseptual 33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 35
B. Lokasi Penelitian 36
C. Informan Penelitian 36
D. Jenis Data 37
E. Tekhnik Pengumpulan Data 38
F. Uji Keabsahan Data 40

G. Tekhnik Analisis Data..... 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan umum
   1. Gambaran umum lokasi penelitian..... 44
   2. deskripsi kpu Kota Solok. 46

B. temuan khusus
   1. upaya kpu Kota Solok dalam menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik 50
   2. Kendala-kendala yang di hadapi kpu Kota Solok dalam menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik..... 56

C. Pembahasan
   1. Upaya KPU menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik. 58
   2. Kendala-kendala yang di hadapi kpu Kota Solok dalam menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik..... 65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 67
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1: Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015

TABEL 1.2: Pengguna Hak Pilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

TABEL 3.1: Informan Penelitian

TABEL 4.1: Batas Wilayah Kota Solok

TABEL 4.2: Pembagian Wilayah Administrasi Kota Solok

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Peta administrasi Kota Solok

Gambar 4.2 : Rumah Pintar Pemilu Kota Solok

Gambar 4.3 : maket tempat pemungutan suara(TPS)

Gambar 4.4 : screnshoot web PPIDKPUKota Solok

Gambar 4.5 : screnshoot Website resmi KPU Kota Solok

Gambar 4.6 : pemilihaan ketua osis di SMP N 1 Solok dengan cara pemilihan umum

Gambar 4.7 : KPU melakukan sosialisasi kesekolah sekolah

Gambar 4.8 : Foto kegiatan Mahasiswa UMMY ke Rumah Pintar pemilu Kota Solok

Gambar 4.9 : KPU soslialisasi ke tokoh masyarakat

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat keterangan penelitian dari pembimbing
3. Surat Pengantar Penelitian Dari Jurusan
4. Surat Izin Penelitian Dari Fakultas
5. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu
6. Surat Edaran Pembentukan Rumah Pintar Pemilu
7. Laporan Evaluasi Rumah Pintar Pemilu Kota Solok

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa lepas dari dimensi kehidupan politik. Hal ini disebabkan karena politik itu sendiri adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara, karena untuk menyelenggarakan pemerintah dan negara dibutuhkan partisipasi politik warga negara itu sendiri. Agar partisipasi nyata warga negara dapat berjalan efektif, diperlukan pemahaman yang benar tentang politik melalui pendidikan politik. Pendidikan politik pada hakekatnya untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik. (Rusadi, 2004)

Salah satu bentuk perilaku pendidikan politik yang mudah diukur intensitasnya adalah partisipasi politik, antara lain melalui perhitungan persentase warga negara yang menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan jumlah warga negara yang berhak memilih. Partisipasi politik penting dalam menentukan kesuksesan sebuah Pemilu sehingga menjadi tolak ukur keberhasilan demokrasi dalam sebuah negara. Untuk meningkatkan partisipasi politik tersebut dapat dilakukan dengan pelaksanaan pendidikan politik yang optimal. Pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam penyelenggaran pemilu. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian tentang pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi masyarakat yang di lakukan oleh (Budianto, 2017, hal. 93-106) menyatakan bahwa:

> "pendidikan politik yang baik mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang karena bila seseorang mempunyai tingkat pengetahuan yang baik dan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan cenderung mau atau berkeinginan untuk ikut berpartisipasi dalam politik khususnya ikut menyukseskan pemilu."

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah telah menargetkan partisipasi politik secara nasional pada Pilkada 2015 yang disepakati bersama sebesar 77,5%, yang mana pada awalnya Badan Perencanaan Pembagunan Nasional menginginkan 80%, tetapi Komisi Pemilihan Umum menyemakati sebesar 75% (Zaman, 2016, hal. 266). Sedangkan negara demokratis di seluruh dunia seperti di Eropa target partisipasi pemilih yang ditetapkan yakni sebesar 64%.

Pelaksanaan Pilkada serentak yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 membuktikan bahwa tingkat partisipasi pemilih belum mencapai target yang ditetapkan secara nasional yakni sebesar 77, 5%. Hal ini terlihat dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak pada 9 provinsi di Indonesia, seperti pada Tabel 1.1 berikut ini,

TABEL 1.1 Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2015

NO	KABUPATEN /KOTA	JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH *	TINGKAT PARTISIPASI	PEMILIH TIDAK MEMILIH
1	Provinsi Kalimantan Tengah	1.994.675	1.042.600	52,27%	47,73%
2	Provinsi Riau	1.234.535	682.534	55,29%	44,71%
3	Provinsi Sumatera Barat	3.545.076	2.079.063	58,65%	41,35%
4	Provinsi Kalimantan Utara	447.637	277.586	62,01%	37,99%
5	Provinsi Sulawesi Utara	1.985.879	1.274.622	64,18%	35,82%
6	Provinsi Kalimantan Selatan	2.897.057	1.921.946	66,34%	33,66%
7	Provinsi Bengkulu	1.450.414	969.068	66,81%	33,19%
8	Provinsi Jambi	2.483.426	1.660.093	66,85%	33,15%
9	Provinsi Sulawesi Tengah	1.996.754	1.392.113	69,72%	30,28%

Sumber: Rumah Pintar PemiluKPU RI (diolah) *terdiri atas DPT, DPTb1 danDPTb2

Selain pilkada gubernur dan wakil gubernur penulis juga mendapatkan angka partisipasi untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota khususnya di Provinsi Sumatera Barat. seperti terlihat dalam Tabel 1.2 di bawah ini ;

TABEL 1.2. PENGGUNA HAK PILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SE-PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 (dilihat dari angka golput tertinggi sampai dengan terendah)

NO	KABUPATEN /KOTA	*JUMLAH PEMILIH	PENGGUNAN HAK PILIH	TINGKAT PARTISIPASI	PEMILIH TIDAK MEMILIH
1	Kabupaten Padang Pariaman	279.482	150.521	53,86%	46,14%
2	Kabupaten Agam	335.510	183.081	54,57%	45,43%
3	Kabupaten Tanah Datar	269.470	149.068	55,32%	44,68%
4	Kabupaten Solok	276.633	155.903	56,36%	43,64%
5	Kota Bukittinggi	74.450	43.823	58,86%	41,14%
6	Kabupaten Sijunjung	149.321	87.999	58,93%	41,07%
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	264.435	161.241	60,98%	39,02%
8	Kabupaten Pasaman Barat	255.226	160.580	62,92%	37,08%
9	Kabupaten Pesisir Selatan	314.755	203.202	64,56%	35,44%
10	Kabupaten Solok Selatan	113.534	76.810	67,65%	32,35%
11	Kabupaten Pasaman	190.712	133.047	69,76%	30,24%
12	Kota Solok	46.091	32.452	70,41%	29,59%
13	Kabupaten Dharmasraya	136.810	99.73 9	72,90%	27,10%

Sumber: Rumah Pintar PemiluKPU RI (diolah) *terdiri atas DPT, DPTb1, DPPh dan DPTb2

Dari data yang penulis dapatkan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kabupaten/kota yang mencapai target angka partisipasi secara nasional (77,5%) sedangkan target partisipasi di Provinsi (dalam pelaksanaan Pilkada 2015 KPU Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan target partisipasi sebesar 75%). tingkat partisipasi pemilih di Kota Solok 70,41% dengan pemilih yang tidak memilih sebesar 29,59.

Data diatas membuktikan bahwa pendidikan politik menjadi hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan untuk mencapai target angka partisipasi warga

negara yang menggunakan hak pilihnya, sehingga keberhasilan demokrasi dapat terwujud. Untuk mewujudkan pendidikan politik yang baik dengan tingkat partisispasi politik yang tinggi tersebut maka peran pemerintah khususnya badan penyelenggara pemilu harus ditingkatkan lagi. Menuntun warga negara menjadi pemilih yang sukarela, mandiri, rasional dan cerdas bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu warga negara harus diberi pengetahuan sehingga dapat menumbuhkan kesadaran politiknya. Disinilah pentingnya peran KPU dalam menyelenggarakan pendidikan pemilih karena dalam pendidikan pemilih, di dalamnya mencakup pemberian informasi kepemiluan, pemahaman mengenai aspek-aspek pemilu serta demokrasi. (Fitriani, 2018)

Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum disebutkan bahwa "untuk meningkatkan kualitas penyelenggaran pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU)"

Sesuai Pasal 2 huruf g UU No 15 Tahun 2011 disebutkan bahwa penyelanggaraan pemilu harus berpedoman pada asas keterbukaan. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggara pemilu yang berasaskan keterbukaan adalah hak publik untuk memperoleh informasi atas penyelanggaraan pemilu.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (4) di tegaskan KPU bekewajiban menyampaikan semua informasi penyelanggaraan pemilu kepada masyarakat.

KPU sebagai badan publik yang menyelenggarakan pemilu diwajibkan untuk mempublikasikan informasi kepemiluan kepada publik.

Masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama bagi KPU, sudah merupakan suatu kewajiban bagi KPU membangun komunikasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas KPU dalam menyelenggarakan pemilu, dan pada akhirnya meningkatkan partisipasi pemilih, KPU menggagas kegiatan pendidikan pemilih dengan pembuatan Rumah Pintar Pemilu.

Menurut Buku Pedoman Pendidikan Pemilih KPU RI hal 27, ada beberapa program dan strategi yang dikembangkan KPU dalam pendidikan pemilih seperti penggunaan teknologi informasi, pemanfaatan media massa, pemanfaatan aktifitas sosial budaya, hadirnya Rumah Pintar Pemilu (RPP), adanya relawan demokrasi dan kreasi serta lain sebagainya.

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu program KPU untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pemilu adalah dengan adanya Rumah Pintar Pemilu (RPP). Rumah Pintar Pemilu adalah media untuk melakukan transformasi informasi kepada masyarakat tentang kepemiluan. Bertujuan untuk melakukan pemahaman tentang pemilu dan demokrasi. Meningkatkan kemampuan bagi penyelenggara pemilu dalam mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai dasar kepemiluan dan nilai-nilai demokrasi.

Rumah Pintar Pemilu merupakan sarana edukasi dan pusat dokumentasi pemilu di setiap daerah dan juga berfungsi sebagai museum pemilu. Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui

pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program-aktifitas project edukasi masyarakat. tentang nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan di indonesia, khusunya wilayah masing-masing. Di dalam tersedia sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi. Untuk menjalankan fungsi itu, berbagai hal tentang pemilu dan domokrasi disampaikan melalui penayangan audio visual, ruang pamer, ruang simulasi dan ruang diskusi.(Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu, KPU RI hal 2)

Sebagai sebuah "institusi" pendidikan pemilih, Rumah Pintar Pemilu wajib menghadirkan program- program yang berkesinambungan (sustainability), seperti kunjungan (audiensi) atau membuat "kelas pemilu" yang pesertanya berasal dari kampus (perguruan tinggi), sekolah, kelompok masyarakat, komunitas, LSM, OMS, atau civil society yang terdapat di daerah setempat, yang mencerminkan segmen-segmen pemilih, yakni segmen perempuan, marginal/pinggiran, keagamaan, disabilitas, pemula, dan pra pemilih. (Buku Rumah Pintar Pemilu, KPU RI hal 12)

Selain itu ada juga program kunjungan dengan cara mendatangkan kelompok-kelompok tersebut melalui surat undangan audiensi, pemutaran film kepemiluan, undangan diskusi/workshop/FGD/seminar, dsb. Petugas pengelola Rumah Pintar Pemilu juga dapat membuat program kunjungan melalui kegiatan di luar Rumah Pintar Pemilu (mobile), seperti kelas pemilu, diseminasi ke masyarakat/ komunitas/ civil society atau terhadap segmen-segmen pemilih yang terdapat di daerah setempat. (Buku Rumah Pintar Pemilu, KPU RI hal 13)

Rumah Pintar Pemilu memiliki target untuk menjadikan masyarakat cerdas dalam pemilu, yang mana ciri-ciri pemilih cerdas dalam pemilu itu adalah mampu menggali rekam jejak calon pemimpin yang ada. Rajin mencari informasi dan mempelajari program, visi misi yang ditawarkan pada masyarakat.

Edukasi kepada masyarakat merupakan target atau (output) yang harus dapat terwujud secara berkesinambungan sebagai bagian dari ikhtiar KPU untuk menciptakan pemilih yang cerdas dalam pemilu dan demokrasi. Untuk mewujudkan output tersebut pengelolaan RPP harus dirancang dengan optimal. KPU di setiap jenjang harus berkreasi dalam mengembangkan aktifitas didalamnya. Jadi tujuan Rumah Pintar Pemilu itu sendiri tidak lepas dari bagaimana masyarakat sadar akan pentingnya Pemilu sehingga dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas.

Rumah Pintar Pemilu(RPP) mulai di resmikan pada tahun 2015. RPP ini berada di dalam kawasan gedung KPU. Komisi Pemilihan Umum RI menargetkan 549 RPP di seluruh Indonesia, yang berada 1 RPP di kantor KPU RI, 34 RPP di KPU Provinsi dan 514 KPU kota/kabupaten. Pembentukan RPP Dilakukan secara bertahap di awal tahun lounchingnya telah berdiri di 9 KPU provinsi dan 18 KPU kabupaten. Di tahun 2016 berdiri 10 Rumah Pintar Pemiludi 10 KPU provinsi. Di tahun 2017 di 15 KPU provinsi dan 273 KPU kabupaten/kota. dan di tahun 2018 di tambah 223 RPP. (*www.politik.rmol.co di akses tanggal 29 april 2018).*

Ditahun 2017 Provinsi Sumatera Barat sudah tersedia 12 Rumah Pintar Pemiluyang di launcing. Termasuk salah satu di KPU Kota Solok. Yang di

launching pada tanggal 21 juni 2017. Rumah Pintar Pemilu di Kota Solok merupakan Rumah Pintar Pemilu yang pertama di launcing sumatera barat. Setelah satu tahun berdirinya Rumah Pintar Pemilu ini Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Solok adapun masyarakat yang berkunjung dari lembaga pendidikan seperti dari sekolah SD, mahasiswa Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Kota Solok, grand finalis Uda Uni Duta Wisata Kota Solok dan Ikatan Uda Uni Kota Solok. Dan masyarakat yang lalu lalang ke KPU.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di KPU Kota Solok dengan bapak Edi Erawadi, S.St selaku kasubag teknis KPU Kota Solok (wawancara: 13 april 2018) menyatakan bahwa :

> "sebagian besar masyarakat yang berkunjung ke Rumah Pintar Pemiluini adalah dari lembaga sekolah, jarang masyarakat awam yang berkunjung. Sejauh ini pihak KPU telah mensosialisikan kepada masyarakat mengenai rumah pintar pemilu, dengan program goes to campus, dan kursus kepemiluan."

Dari pengamatan penulis pemanfaatan RPP masih belum optimal. Ini disebabkan karena masih awamnya pengetahuan masyarakat akan hadirnya RPP di KPU. Hal ini menyebabkan tujuan dari RPP tersebut belum terealisasikan. Yang mana tujuan dari Rumah Pintar Pemilu ini adalah mengedukasi masyrakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi dengan cara memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi kepada pra pemilih, meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi bagi seluruh segmen serta menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasibagi seluruh segmen. Hal ini sesuai dengan yang di katakan Devisi partisi masyrakat KPU Sumatera barat menyatakan pada pemilu pada tahun 2014 lebih dari 6 persen suara tidak sah, itu disebabkan kurangnya

pengetahuan serta informasi tentang pemilu di masyarakat. Masalah lain yang penulis temui adalah minimnya ketertarikan masyarakat untuk mengunjungi Rumah Pintar Pemilu menjadi kendala kurangnya pemanfaatan RPP di KPU Kota Solok.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang ditulis oleh Qurotul Fitriani dengan judul upaya KPU kabupaten gresik untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula melalui Rumah Pintar PemiluRaden Paku. Penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis teliti sama-sama mengkaji mengenai Rumah Pintar Pemilu, namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih menitik beratkan pada peningkatkan partisipasi pemilih.

Selain Rumah Pintar Pemilu di Kota Solok ada beberapa Rumah Pintar Pemilu yang telah di louncing di KPU kota dan kabupaten di seluruh indonesia yang sepi pengunjung, salah satunya Rumah Pintar Pemilu yang berada di provinsi Sulawesi Selatan KPU Kecamatan Enrekang. Ketua KPU Enrekang Ridwan Ahmad menyatakan :

> "...rumah pintar ini belum mampu menarik minat warga Enrekang, padahal untuk mendirikan rumah pintar KPU tersebut anggaran yang di habiskan senilai Rp 35 juta. Di akui hingga saat ini, pengunjung sangat minim paling tinggi itu lima pengunjung per hari, bahkan kadang tidak ada. Namun demikian KPU mengupayakan langkah inovatif untuk mendorong masyarakat berkunjung dengan KPU masuk ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi pemilu dan mengajak siswa untuk berkunjung di rumah pintar pemilu."

Selain Rumah Pintar PemiluEnrekang, di Provinsi Jawa tengah tepatnya di kabupaten banjarnegara, Rumah Pintar Pemilu Banjarnegara juga sepi pengunjung. Bahkan masih sangat sedikit masyarakat yang mengetahui adanya RPP di kantor KPU Banjarnegara. Warga kelurahan Kutabanjarnegara menilai

keberadaan RPP di kantor KPU Banjarnegara masih kurang populer di kalangan masyarakat. hal ini terlihat masih belum ada masyarakat perseorangan yang datang ke RPP, hanya beberapa pengunjung yang sifatnya kolektif seperti dari sekolah berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini penting dilakukan untuk melihat lebih jauh bagaimana upaya KPU menjadikan Rumah Pintar Pemilu khususnya di Kota Solok sebagai sarana pendidikan politik. Kota Solok penulis jadikan tempat penelitian dengan alasan bahwa kota ini telah terlebih dahulu melaunching Rumah Pintar Pemiludi bandingkan kota lain yang ada di Sumatera Barat yaitu pada tanggal 21 juni 2017. Sesuai dengan yang dikatakan oleh anggota KPU RI Ilham Saputra, didalam peresmian Rumah Pintar Pemilu ini, beliau mengatakan

> "RPP bareh Solok yang didirikan KPU menjadi RPP kota petama di Sumbar,oleh karena itu di harapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pemilu kepada masyarakat luas, Pemilih bukan urusan memilih saja. Hal yang terpenting yakni bagaimana menciptakan pemilih rasional. Hingga bisa menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan yang dikehendaki rakyat.

Selain itu penulis ingin melihat bagaimana pencapaian tujuan dari Rumah Pintar Pemilu ini sebagai salah satu program KPU untuk meningkatkan pendidikan politik.

Berangkat dari pengamatan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan mengambil judul:

" **Upaya KPU Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan seperti diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat belum mencapai target yang telah di tetapkan
2. Banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya
3. Pendidikan politik yang kurang terealisasikan.
4. Rumah Pintar Pemilusepi pengunjung meskipun sudah di lakukan sosialisasi
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hadir RPP sehingga salah satu sarana pendidikan politik belum di manfaatakan secara optimal.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi masalah penelitian ini dengan tujuan untuk lebih terarahnya penelitian ini, dan mencegah uraian yang menyimpang dari masalah yang akan diteliti, serta tidak menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran. Dengan mempertimbangkan keterbatasan penulis, maka penulis membatasi penelitian ini hanya dalam konteks bagaimana strategi KPU dalam menjadikan Rumah Pintar Pemilusebagai serana pendidikan politik serta kendala yang dihadapi oleh KPU dalam menjadkan Rumah Pintar Pemilusebagai sarana pendidikan politik.

D. Rumusan masalah :

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut

1. Bagaimana upaya KPU menjadikan Rumah Pintar Pemilusebagai sarana pendidikan politik ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi KPU dalam menjadikan Rumah Pintar Pemilusebagai sarana pendidikan politik ?

E. Tujuan penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi upaya KPU menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi KPU dalam menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik.

F. Manfaat penelitian :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini merupakan bentuk kontribusi ilmiah yang nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan sumbangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak terkait khususnya KPU sebagai penyelenggara pemilu, guna meningkatkan kinerjanya agar mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pemilu. Bagi pembaca, penulis mengharapkan

penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran pembaca untuk dapat memanfaatkan Rumah Pintar Pemilusebagaimana yang di harapkan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di lakukan di dapatkan upaya KPU kota solok dalam menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik

a. Melakukan sosialisasi melalui radio, selebaran-selebaran tentang rumah pintar pemilu kepada masyarakat dan juga memanfaatkan web KPU Kota Solok.
b. Melakukan kunjungan (visit) kesekolah-sekolah untuk mensosialisasikan pemilu.
c. Melakukan kerjasama dengan fakultas hukum UMMY solok sehingga mahasiswa dapat belajar banyak dan melakukan penelitian atau studi tentang kepemiluan.
d. Melakukan sosialisasi pemilu 2019 kepada tokoh masyarakat.

Dalam menjalankan upaya- upaya tersebut adalah kendala-kendala yang di hadapi KPU mulai dari SDM dan anggaran yang KPU dalam menjalankan upaya-upaya kpu terkendala dalam kuranganya SDM.

B. Saran

Rumah pintar pemilu merupakan salah satu sarana dalam pendidikan politik bagi masyarakat, oleh karena itu perlu di dukung oleh semua pihak untuk merealisasikan hal ini mulai dari pihak penyelenggara dan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Agus, L. (2009). *pilkada dan dinamika politik lokal.* pustaka pelajar.

Budianto, R. (2017). eJournal Ilmu Pemerintahan. *Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Tahun 2014 Di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda.*, hal. 93-106.

Budiarjo, M. (1998). *partisipasi dan partai politik.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Fitriana, Q. (2018). kajian moral dan kewarganegaraan. *upaya KPU kabupaten gresik untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula melalui rumah pintar pemilu raden paku*, hal. 414-428.

kartono, k. (2009). *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa.* Bandung: Mandar Maju.

Rusadi, K. (2004). *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar.* Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sendhikasari, D. (2015, Desember). Buletin Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri. *pilkada serentak 2015 dan agenda good governance*.

Simanjuntak, N. (2017). Jurnal Bawaslu. *PEMANTAUAN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILU*, hal. 305-321.

Surbakti. (2016). *Pidato Inagurasi Anggota Baru Akademi Ilmu Pengetahuan.* surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas.

Surbakti, R., & Supriyanto, D. (2013). *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaran Pemilihan Umum.* Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Zaman, R. K. (2016). *perjalanan panjang pilkada serentak.* jakarta: mizan publika.

http://mip.umy.ac.id/id/mip-umy-dan-kpu-bantul-kerjasama-dalam-launching-rumah-pintar-pemilu-omah-pemilu/di akses tanggal 10 oktober 2018.)